

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### *BAB I, berisi :*

- a. *Latar Belakang*
- b. *Maksud dan Tujuan*
- c. *Dasar Hukum  
Penyusunan Laporan  
Kinerja*
- d. *Sejarah Kota  
Sawahlunto*
- e. *Gambaran Umum  
Kota Sawahlunto*
- f. *Struktur Organisasi  
Perangkat Daerah*
- g. *Isu-Isu Strategis*
- h. *Sumber Daya  
Aparatur*
- i. *Sistematika  
Penyajian*

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa salah satu azas umum penyelenggaraan pemerintahan adalah Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

negara dapat dipertanggungjawabkan ke dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah dianggarkan pada setiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018. Realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran. Laporan Kinerja Kota Sawahlunto merupakan dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai "yel-yel" yang dapat memberikan motivasi dan semangat bagi semua Aparatur Sipil Negara Kota Sawahlunto :

"SIAPA KITA?" dengan jawaban "SAWAHLUNTO"

"SAWAHLUNTO" dengan jawaban "JAYA"

"MASYARAKAT" dengan jawaban "SEJAHTERA"

"OLAH RAGA" dengan jawaban "OKE"

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2017 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2013-2018. Maksud dari disusunnya Laporan Instansi Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2017.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sawahlunto bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2017. Dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Dengan pendekatan ini ,Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### **C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2017 dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta Peraturan Daerah terkait dengan Dokumen Perencanaan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018;
- h. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Sawahlunto;
- i. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

### **D. Sejarah Kota Sawahlunto**

Kota Sawahlunto adalah salah satu kota di Propinsi Sumatera Barat, Indonesia . Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut Kota Padang ini, dikelilingi oleh 3 Kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawahlunto memiliki luas

273,45 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 kecamatan dengan penduduk lebih dari 65.042 jiwa (data tahun 2017).

Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, Kota Sawahlunto dikenal sebagai Kota Tambang Batubara. Kota Sawahlunto sempat mati , setelah penambangan batubara dihentikan.

Saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tertua terbaik di Indonesia. Kota Sawahlunto didirikan pada tahun 1888, masih banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi “Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”, dalam visi jangka panjang 2000 – 2020.



## **E. Gambaran Umum Kota Sawahlunto**

### **1. Aspek Geografi**

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Lembah Segar. Secara astronomis Kota Sawahlunto terletak antara 0°33'40"-0° 48' 33" Lintang Selatan dan 100° 41'59"-100°49'60" Bujur Timur dengan luas 27.345 Ha atau sekitar 0,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Jarak dari Kota Sawahlunto ke Kota Padang (ibukota propinsi) adalah 95 km, dapat ditempuh melalui jalan darat dalam waktu sekitar 2 jam dengan kendaraan roda empat.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2016**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>
Kecamatan Silungkang	32,93
Kecamatan Lembah Segar	52,58
Kecamatan Barangin	88,55
Kecamatan Talawi	99,39
<b>Jumlah</b>	<b>273,45</b>

*Sumber : BPS Tahun 2016*

Secara administratif Kota Sawahlunto terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 Desa. Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar di Bagian Utara, Kabupaten Solok di sebelah Selatan dan Barat serta dengan Kabupaten Sijunjung di bagian Timur.

Secara topografi wilayah Sawahlunto terletak di perbukitan dengan ketinggian antara 250-785 meter dari permukaan laut, terbentang dari utara ke selatan. Sebagian besar wilayah Kota Sawahlunto terletak pada ketinggian 100-450 meter, temperatur udara berkisar antara 22°C - 33°C.

Sebagian besar wilayah Kota Sawahlunto merupakan kebun campuran yaitu seluas 10.057 Hektar. Hutan merupakan lahan dengan luas terbesar kedua di Kota Sawahlunto dengan luas lahan 4.322 Hektar. Luas semak / alang-alang yaitu 3.909 Hektar, kampung / pemukiman 3.086 Hektar, Sawah 2.094 Hektar dan kantor / industri seluas 975 Hektar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Luas Lahan Menurut Penggunaannya per Kecamatan Tahun 2017**

<b>Penggunaan</b>	<b>Silungkang</b>	<b>Lembah Segar</b>	<b>Barangin</b>	<b>Talawi</b>	<b>JML Luas /Area (Ha)</b>
Kampung	496	732	925	927	11,26
Kontor / industri	6	12	54	903	3,57
Sawah	137	176	639	1142	7,66
Tegal/Kebun/Ladang	64	160	56	3	1,03
Kebun Campuran	1202	2977	4273	1609	36,70

Perkebunan	90	167	399	1467	7,76
Hutan	510	368	194	3226	15,98
Semak/alang-alang	754	664	2279	187	14,37
Kolam/Tebat/Empang/Danau	29	-	-	-	0,11
Tanah terbuka/tandus/rusak	-	-	23	392	1,52
Taman Rekreasi	5	2	13	34	0,02
Lain-lain	-	-	-	49	0,02

Sumber : Sawahlunto dalam angka Tahun 2017

## 2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2017 adalah 65.042 jiwa atau meningkat 7,01 persen dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2016. Jika dilihat menurut kecamatan, jumlah penduduk Kecamatan Barangin yang terbesar dibandingkan kecamatan lainnya dengan populasi mencapai 19.849 jiwa atau mencapai 30,5 persen dari total penduduk Kota Sawahlunto. Kecamatan dengan populasi penduduk terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan jumlah penduduk 11.620 jiwa.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**  
**di Kota Sawahlunto Tahun 2017**

No	Kecamatan	Rincian	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Talawi	Jumlah Penduduk	18.448	18.681	18.910	19.147	19.711
		- Laki-laki	9.267	9.403	9.554	9.650	9.902
		- Perempuan	9.181	9.278	9.356	9.497	9.809
2	Barangin	Jumlah Penduduk	17.681	17.918	18.099	18.391	19.849
		- Laki-laki	8.715	8.850	8.871	9.095	9.887
		- Perempuan	8.966	9.068	9.228	9.296	9.962
3	Lembah Segar	Jumlah Penduduk	12.206	12.214	12.230	12.123	13.862
		- Laki-laki	5.911	5.926	5.950	5.888	6.921
		- Perempuan	6.295	6.288	6.280	6.235	6.941
4	Silungkang	Jumlah Penduduk	10.298	10.795	10.947	11.117	11.620
		- Laki-laki	5.312	5.401	5.496	5.570	5.907
		- Perempuan	5.325	5.394	5.451	5.547	5.713

Sumber : Sawahlunto dalam angka Tahun 2017 dan Disdukcapil

Secara umum tingkat kepadatan penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2016 adalah 222,26 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan cukup bervariasi. Kecamatan dengan tingkat penduduk tertinggi adalah Kecamatan Silungkang dengan kepadatan 337,6 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan

penduduk terendah adalah Kecamatan Talawi dengan kepadatan 192,6 jiwa per kilometer persegi.

Sex ratio merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2017 adalah 99,41 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Sex ratio antar kecamatan juga cukup bervariasi, Kecamatan Talawi 99,06 dan Silungkang 96,72.

Piramida penduduk sangat bermanfaat dalam melihat struktur umur penduduk dan perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Secara umum piramida penduduk Kota Sawahlunto berbentuk ekspansif, dimana jumlah penduduk mudanya lebih besar dibandingkan penduduk usia dewasa. Hal ini mengindikasikan Kota Sawahlunto akan mengalami pertumbuhan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 7,01 %.



Peta Kota Sawahlunto

## F. Organisasi Perangkat Daerah

Seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto berdasar Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;

d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman;
3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

e. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Talawi;
2. Kecamatan Barangin;
3. Kecamatan Lembah Segar;
4. Kecamatan Silungkang.

g. Kelurahan, terdiri dari :

1. Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
2. Kelurahan Kubang Sirakuk Utara;
3. Kelurahan Air Dingin;
4. Kelurahan Aur Mulyo;



5. Kelurahan Pasar;
  6. Kelurahan Tanah Lapang;
  7. Kelurahan Saringan;
  8. Kelurahan Lubang Panjang;
  9. Kelurahan Durian I;
  10. Kelurahan Durian II.
- h. Rumah Sakit Umum Daerah

## **G. Isu-Isu Strategis**

### **1. Urusan Wajib Pendidikan**

Permasalahan pembangunan pada urusan pendidikan adalah masih tingginya angka tidak melanjutkan hingga jenjang SMA dan Perguruan Tinggi, sehingga upaya untuk menjangkau kelompok anak miskin terlayani dalam pendidikan menjadi keharusan. Selain dari itu kualitas pendidikan mesti terwujud pada seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Kurangnya mutu guru perlu dilakukan dengan pembinaan guru yang komprehensif, peningkatan keilmuan dan pedagogi, pembinaan manajemen sekolah, pemenuhan alat dan media pembelajaran di sekolah (prasarana sekolah belum memenuhi SPM) juga menjadi permasalahan di bidang pendidikan ini.

### **2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelolaan pemberdayaan masyarakat menjadi kendala yang berarti dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Sawahlunto. Kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan belum optimal, juga menjadi kendala dalam pemberdayaan perempuan. Maka untuk menjamin pemenuhan hak anak pemerintah daerah mendukung kebijakan nasional, dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kota Layak Anak yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

### **3. Urusan Wajib Kesehatan**

Permasalahan kesehatan dan sosial di Kota Sawahlunto terlihat pada pelayanan prima belum dapat dilaksanakan dengan baik karena letak geografis kurang mendukung. Selain itu, permasalahan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat relatif rendah. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit

menular. Masih banyaknya SPAL masyarakat yang belum memenuhi syarat dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang, higienis dan sanitasi. Untuk masalah tenaga kesehatan jumlah Dokter Spesialis masih belum lengkap dan adanya kualitas kesenjangan SDM. Masalah sarana kesehatan terlihat dari Sistem/Instalasi pengelolaan limbah dan air belum memadai, sirkulasi air bersih kurang lancar, dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan.

Selain ketersediaan tenaga membangun sistem yang mudah untuk bidang kesehatan dan sosial menjadikan kedua sektor ini dapat dengan mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukannya. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan penyuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu terus menerus diupayakan.

#### **4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pada urusan pekerjaan umum, belum semua ruas jalan dalam kondisi mantap dan belum memiliki masterplan pembangunan infrastruktur secara komprehensif yang diperlukan oleh masyarakat saat ini masih terdapat backlog (kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah kebutuhan) perumahan karena tanah banyak dikuasi oleh kuasa penambangan PT.BA dan PT.KAI. Selain itu, penguasaan tanah adalah tanah ulayat yang menyulitkan banyak pihak swasta berinvestasi di sektor perumahan serta kurangnya partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja juga belum optimal secara komunal. Sistem pengolahan sampah di TPA cenderung open dumping dengan sarana prasarana kurang memadai menyebabkan pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat. Pemetaan keperluan pelayanan PU untuk daerah tujuan wisata serta fasilitas pendukungnya merupakan hal yang penting, dan hal ini disinergikan dengan penyiapan masyarakat sadar wisata.

Pengelolaan sumber daya air juga masih mengalami permasalahan, standar pelayanan air minum belum memenuhi syarat kesehatan ditambah lagi dengan masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan Air

Minum serta keterbatasan ketersediaan air di musim kemarau dan keterbatasan sumber air baku. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyak pembangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan.

Dari segi perencanaan, dokumen penataan ruang masih ada yang belum menjadi produk hukum. SDM penataan ruang masih kurang baik, baik secara kuantitas maupun kualitas. Topografi wilayah rawan patahan juga menjadi permasalahan dalam mengembangkan sektor perhubungan di Kota Sawahlunto serta Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang masih rendah karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang. Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan pembangunan masih rendah. Semua hal ini menjadi hambatan dalam pengelolaan ruang di Kota Sawahlunto.

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pemukiman tersebut terkait pembangunan bidang air minum dan sanitasi, sebagaimana amanat RPJMN 2015-2019. Pembangunan bidang air minum dan sanitasi harus mencapai akses 100% capaian air minum, 0% kawasan kumuh dan capaian akses sanitasi 100%, dalam rangka pencapaian universal access pada tahun 2019.

#### **5. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Kawasan pemukiman padat dan tidak teratur pada pusat kota dan sub pusat kota menjadi permasalahan utama dalam pembangunan perumahan di Kota Sawahlunto. Pola pemukiman masih belum sesuai dengan peruntukkan penggunaan lahan disebabkan belum ada regulasi penetapan kawasan perumahan. Saat ini masih terdapat backlog perumahan karena tanah banyak dikuasi oleh kuasa penambangan PT.BA dan PT.KAI. Selain itu, penguasaan tanah adalah tanah ulayat yang menyulitkan banyak pihak swasta berinvestasi di sektor perumahan.

#### **6. Urusan Wajib Perhubungan**

Untuk urusan perhubungan permasalahan yang dihadapi Kota Sawahlunto adalah aksesibilitas transportasi yang belum merata, dimana banyak bagian wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi. Tempat parkir sangat terbatas dibanding dengan kebutuhan masyarakat. Masih kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas seperti belum adanya terminal Tipe A di Kota Sawahlunto. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM

pengelola perhubungan kota juga menjadi permasalahan dalam pembangunan kota . Dari segi masyarakat terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana lalu lintas. Topografi wilayah rawan patahan juga menjadi permasalahan dalam mengembangkan sektor perhubungan di Kota Sawahlunto.

#### **7. Urusan Wajib Lingkungan Hidup**

Permasalahan pembangunan di sektor lingkungan hidup terlihat dari penurunan kualitas air sungai, pencemaran lingkungan akibat aktifitas industri dan pertambangan serta dampak pemanasan global semakin meningkat. Kurangnya SDM pengelola lingkungan hidup ditambah lagi dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup juga menjadi permasalahan dalam pembangunan lingkungan hidup di Kota Sawahlunto. Peta pengembangan daerah kawasan hijau dan proses penanaman kembali daerah kritis menjadi sangat strategis untuk masa depan Kota Sawahlunto.

#### **8. Urusan Wajib Pertanahan**

Untuk urusan pertanahan, sulitnya pembebasan tanah masyarakat menjadi permasalahan utama dalam pembangunan. Kepemilikan tanah ulayat yang tidak yang tidak jelas, rentan terjadinya konflik tanah ulayat. Permasalahan tapal batas dengan daerah tetangga juga menjadi permasalahan rutin yang mestinya dapat diselesaikan secara tepat. Upaya mengurangi permasalahan tanah, dan memulai penyelesaiannya akan berdampak kepada penataan kepemilikan tanah di kemudian hari.

#### **9. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Kualitas SDM aparatur pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang sudah memadai serta partisipasi masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga berdampak baik pada penerapan SIK online di Kota Sawahlunto, jadi pengembangan sistem layanan dan penegakan sanksi menjadi perlu dalam mengatasi masalah ini.

#### **10. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Keberadaan masyarakat multi etnis yang hidup berdampingan dan masih menjaga khasanah budaya gotong royong akan dijadikan kekuatan dalam pembangunan Kota Sawahlunto. Membangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat akan

tetap diprioritaskan. Keberadaan LPM, Kelompok Masyarakat, Karang Taruna dan tokoh masyarakat akan dimanfaatkan untuk mempermudah pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

#### **11. Urusan Wajib Tenaga Kerja**

Masalah ketenaga kerjaan masih menjadi permasalahan pembangunan di Kota Sawahlunto. Walaupun tidak signifikan permasalahan tenaga fungsional ketenagakerjaan juga menjadi hambatan dalam pelayanan ketenagakerjaan. Kualitas pencari kerja yang terampil belum memadai dan terbatasnya jumlah permintaan tenaga kerja dari dunia usaha menyebabkan kesempatan kerja di Kota Sawahlunto relatif rendah.

Sawahlunto dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga terampil dengan memilih dan mengembangkan berbagai jenis keterampilan bersertifikasi. Melalui pemantapan sekolah kejuruan, sekolah komunitas, Dinas Tenaga Kerja dapat membangun sistem yang mempertemukan dunia pemakai, dengan pencari kerja. Dari segi pelayanan, sistem informasi dan data ketenagakerjaan belum optimal serta rendahnya transparansi penerimaan tenaga kerja juga beberapa hal yang perlu dibenahi.

#### **12. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

Sistem komunikasi dan informatika Kota Sawahlunto masih terkendala sarana dan prasarana teknologi informasi yang belum memadai. Sistem informasi manajemen yang tersedia pun belum dimanfaatkan secara optimal. Di tingkat desa masih adanya jaringan internet yang belum terjangkau ke desa. Pengembangan Komunikasi dan Informasi di web dengan metoda lainnya di luar untuk memarketingkan Sawahlunto perlu dibenahi, selain juga sistem pelayanan untuk para pendatang, permasalahannya antara lain :

- Koordinasi antar instansi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi masih lemah, hal ini dapat dilihat dengan adanya koneksi internet yang dilakukan oleh masing-masing Instansi padahal beberapa instansi mempunyai data yang sama.
- Aplikasi yang sama atau saling berkaitan dikembangkan oleh masing-masing instansi seperti kepegawaian, keuangan, kesehatan dan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa integrasi infrastruktur, aplikasi dan data belum terbentuk.
- Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah

- Pemanfaatan IPTEK dan TI di masyarakat masih kurang
- Pemanfaatan teknologi dan informasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal.

### **13. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan pembangunan di sektor Koperasi dan UMKM masih rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM dalam berinovasi dan pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan kualitas produk UMKM yang dihasilkan belum memenuhi standar nasional. Selain itu, tingkat ketergantungan sektor ini terhadap pemerintah yang tinggi. Kemampuan pengelola koperasi dan partisipasi aktif anggota koperasi dan UMKM juga belum profesional.

### **14. Urusan Wajib Penanaman Modal**

Permasalahan pembangunan untuk penanaman modal utamanya adalah belum adanya kebijakan insentif mengenai penanaman modal yang menjadi daya tarik investor, terbatasnya potensi daerah untuk menarik investor, kesiapan kecakapan aparatur untuk mengelola investasi yang kompeten termasuk penataan organisasi dan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kebijakan yang mengatur pengembangan BUMD dan belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

### **15. Urusan Wajib Kebudayaan**

Dalam upaya pelestarian nilai budaya daerah, budaya luar yang memberikan pengaruh negatif terhadap budaya daerah memberikan kendala yang berarti bagi Kota Sawahlunto. Hal ini ikut mempengaruhi apresiasi masyarakat terhadap budaya dan seni daerah. Dari segi akhlak mulia, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan adat mulai berkurang sehingga perlu penerapan pendidikan berkarakter yang tepat.

### **16. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga**

Belum terbangunnya sistem keolahragaan di sekolah-sekolah merupakan akar masalah rendahnya minat berolahraga. Selain juga terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan olahraga menjadi permasalahan utama dalam pengembangan keolahragaan di Kota Sawahlunto. Selain itu, belum optimalnya pembinaan dan pengelolaan kelembagaan pemuda dan olahraga juga menghambat perkembangan keolahragaan di Kota Sawahlunto. Dampak negatif dari adanya media sosial

dan IT terhadap generasi muda semakin terasa, dengan berkurangnya nilai kekeluargaan dan semangat gotong royong.

#### **17. Urusan Wajib Pangan**

Jika dilihat dari ketersediaan pangan, ketersediaan pangan lokal Kota Sawahlunto melebihi dari konsumsi per kapita per tahun untuk ketersediaan beras, daging sapi dan ayam ras pedaging. Sedangkan untuk ketersediaan pangan utama telur ayam dan ikan darat belum mencukupi sehingga Kota Sawahlunto menjadi ketergantungan pasokan pangan dari daerah tetangga. Selain itu, harga komoditas pangan fluktuatif dan belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan pangan lokal untuk mendukung penganekaragaman konsumsi pangan juga merupakan permasalahan yang harus dibenahi dalam membangun ketahanan pangan Kota Sawahlunto.

#### **18. Urusan Wajib Statistik**

Sistem pengelolaan data yang masih manual menjadi tantangan utama dalam urusan statistik ini. Akibatnya belum ada dokumen data yang berseries dan dapat diakses semua orang dalam waktu cepat. Dari segi penyajian data, ketergantungan terhadap pihak BPS tidak dapat dihindari. Akan tetapi masalah lain yang muncul adalah adanya perbedaan metode penghitungan data antara BPS dan Pemerintah Daerah.

#### **19. Urusan Wajib Perpustakaan**

Dalam pengembangan kearsipan dan kepustakaan dibutuhkan solusi untuk menangani rendahnya sistem dan fasilitas dalam mengelola kearsipan dan kepustakaan. Kurangnya kualitas pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang kearsipan dan perpustakaan ditambah lagi koleksi buku belum sebanding dengan kebutuhan penggunaa menyebabkan kurangnya minat pengunjung ke pustaka. Untuk arsip pemerintah daerah, kurangnya kesadaran/tertib OPD terhadap pentingnya pengelolaan arsip / dokumen menyebabkan penanganan arsip daerah menjadi terkendala.

#### **20. Fungsional Penunjang**

##### **- Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan dalam perencanaan pembangunan secara garis besar adalah pada tiga hal. Pertama, kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten serta tidak sinkron antar lembaga Pemerintah Pusat. Hal ini menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang konsisten dan sinkron antar OPD. Kedua, masih

rendahnya pemahaman antar OPD dalam menyusun perencanaan yang konsisten dan sinkron dengan OPD lainnya. Ketiga adalah rendahnya jumlah dan kuantitas SDM perencana. Persoalan ini menyebabkan proses perencanaan dari awal sampai evaluasi perencanaan tidak berjalan dengan baik.

- Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah

Ancaman melemahnya paham kebangsaan dikalangan masyarakat menjadi permasalahan utama dalam pengembangan wawasan kebangsaan saat ini. Akibatnya terjadi kerentanan terhadap potensi konflik sosial. Di bidang politik, rendahnya pemahaman peraturan di bidang politik ditengah masyarakat juga masih merupakan permasalahan yang harus diatasi. Sedangkan dalam masalah penanganan bencana, sistem koordinasi penanganan bencana masih rendah dan belum memiliki dokumen kontigensi. Faktor penting lainnya adalah belum tersedianya sistem dan teknologi informasi dalam mendukung penanganan bencana . Sinergitas aparat sipil dan militer dalam program pembangunan masih perlu ditingkatkan.

- Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, rendahnya Pendapatan Asli Daerah terhadap keuangan daerah menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Akibatnya ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pemerintah tinggi. Dari segi kompetensi pegawai, mutu dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.

- Dari strategi pembangunan nasional yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita khususnya Cita ke -2 yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian yaitu : 1 ) norma pembangunan, 2 ) tiga dimensi pembangunan, 3 ) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung, serta 4 ) program-program quick wins. Dapat dilihat permasalahan dalam penerapan reformasi birokrasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan terpercaya



dalam rangka mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat diantaranya :

- a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasisi elektronik dan internet belum optimal
- b. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintah dirasa belum optimal. Kerjasama yang dilakukan masih terbatas terutama dengan kabupaten/kota yang berbatasan.
- c. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah dan Anggota Masyarakat. Inovasi ini masih sedikit dan belum optimal.
- d. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah yang wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintah Daerah ini belum maksimal.

## **21. Urusan Pilihan Pertanian**

Untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian jangka panjang, masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi hambatan yang berarti. Dari potensi daerah yang belum tergarap, masih ada lahan pertanian yang belum tergarap. Dari segi petani, rendahnya kemauan dan keterampilan petani untuk meningkatkan produktifitas pertanian juga mengakibatkan sulitnya meningkatkan kualitas pertanian di Kota Sawahlunto. Pola pikir masyarakat terutama generasi muda yang mengatakan petani merupakan pekerjaan kurang berkelas juga menjadi tantangan di masa depan. Dari segi pengelolaan pasca panen, industri pengolahan hasil pertanian di Kota Sawahlunto relatif minim.

## **22. Urusan Pilihan Pariwisata**

Permasalahan pariwisata Kota Sawahlunto lebih mengarah pada pengelolaan yang sudah ada. Saat ini, belum ada skenario besar pengembangan kepariwisataan sehingga daya tarik wisata belum terintegrasi. Hal lain yang juga sangat berpengaruh adalah belum ada

penjabaran rinci dan teknis dari kebijakan pariwisata yang ada. Dari segi sarana penunjang, keterbatasan sarana transportasi umum menjadi permasalahan bagi pengunjung. Dari segi pengelolaan potensi pariwisata yang ada, kualitas SDM rendah dan arahan tepat guna bagi pemanfaatan lahan belum terbangun menyebabkan investor pariwisata belum melirik Kota Sawahlunto.

### **23. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

Perikanan mungkin bukanlah prioritas di Kota Sawahlunto, akan tetapi jika dikelola dengan baik dapat dijadikan salah satu alternatif pendapatan masyarakat. Permasalahan yang ada saat ini adalah produksi benih ikan masih rendah dan volume air tidak mencukupi untuk budidaya perikanan darat. Dari segi pelayanan, kuantitas SDM yang masih kurang menjadi hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saat ini, harga pakan ikan di Kota Sawahlunto juga relatif mahal.

### **24. Urusan Pilihan Perdagangan**

Masalah dalam pengembangan perdagangan di Kota Sawahlunto adalah ketersediaan jenis barang kurang beragam dan harga relatif tinggi. Pencantuman harga komoditas, dan akreditasi perdagangan menjadi kata kunci ke depan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal salah satunya keberadaan pedagang grosir belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Keberadaan mobil dan motor ngampas sampai kerumah penduduk juga menjadi ancaman dalam pengembangan perdagangan di pasar Sawahlunto. Hal ini berimplikasi pada perubahan perilaku masyarakat dalam belanja. Dari segi sarana dan prasarana, bangunan pasar baru sudah mencukupi untuk pasar kebutuhan pedagang, akan tetapi perlu diperhatikan juga sarana penunjang pasar tersebut.

### **25. Urusan Pilihan Perindustrian**

Permasalahan yang dihadapi dalam membangun sektor industri di Kota Sawahlunto adalah keterampilan teknis, kemampuan pengembangan desain, serta kemampuan manajemen perajin dan pelaku IKM masih rendah. Selain itu, dari segi sarana dan prasarana rendahnya kualitas teknologi dan peralatan pendukung proses produksi yang dimiliki pengrajin dan pelaku IKM. Pemanfaatan bahan baku lokal yang belum maksimal juga akan menyebabkan pendeknya mata rantai ekonomi untuk sektor industri Kota Sawahlunto. Belum adanya pusat inovasi bagi industri dan belum adanya

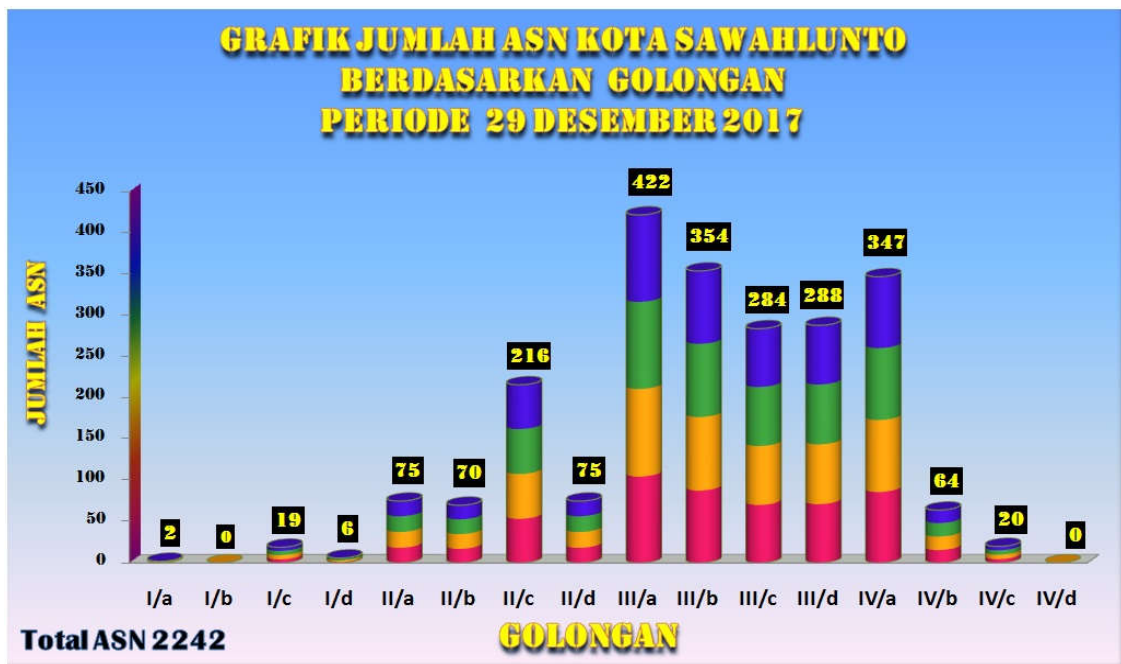
regulasi dan kebijakan dukungan kepada perajin dan pelaku IKM terutama dalam hal permodalan dapat menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan industri.

## H. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2017 berjumlah 2242 orang, yang dapat digambarkan pada grafik dibawah ini :

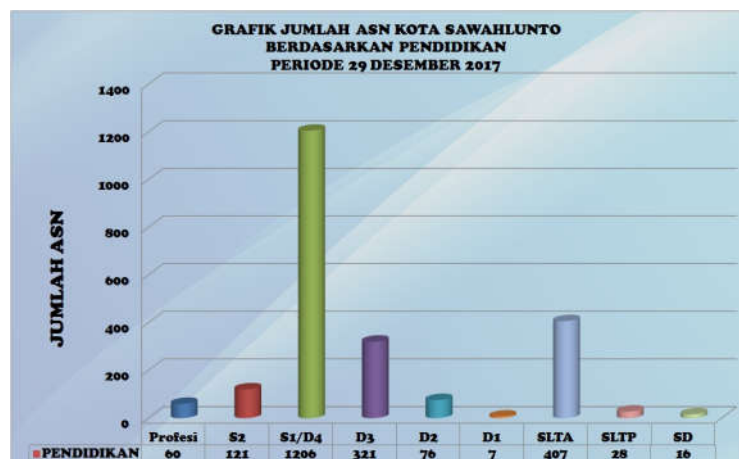
Grafik 1.1

### Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan

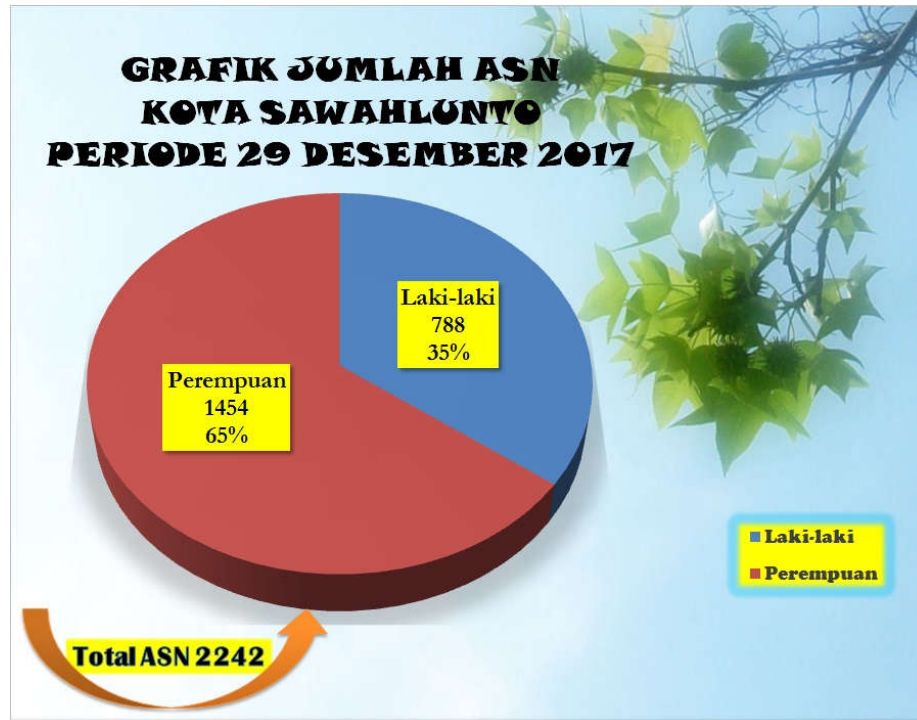


Grafik 1.2

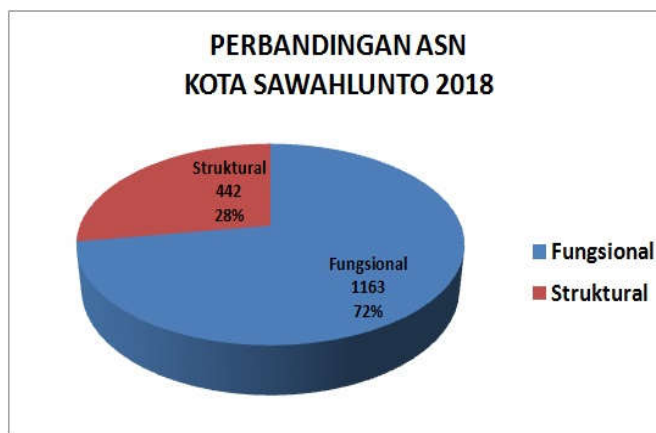
### Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan



**Grafik 1.3**  
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin



**Grafik 1.4**  
Perbandingan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan



## **I. Sismatika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) Bab yang terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dasar hukum penyusunan laporan kinerja, gambaran umum Kota Sawahlunto, susunan organisasi perangkat daerah, sumber daya aparatur, isu-isu strategis dan sistematika penyajian.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan analisis dan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2017, yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2017, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2013-2018, untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan Standar Nasional, Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi sertalangkah-langkah antisipatif yang diambil serta realisasi anggaran.

### **BAB IV PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2017 dan upaya/langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam rangka peningkatan kinerjanya.